



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA



PERKEMBANGAN EITI INDONESIA

Sekretariat EITI

Batam, 9 April 2018

Mandat dan Kegiatan EITI

Mandat

Transparansi dan Akuntabilitas Tata kelola Industri Ekstraktif

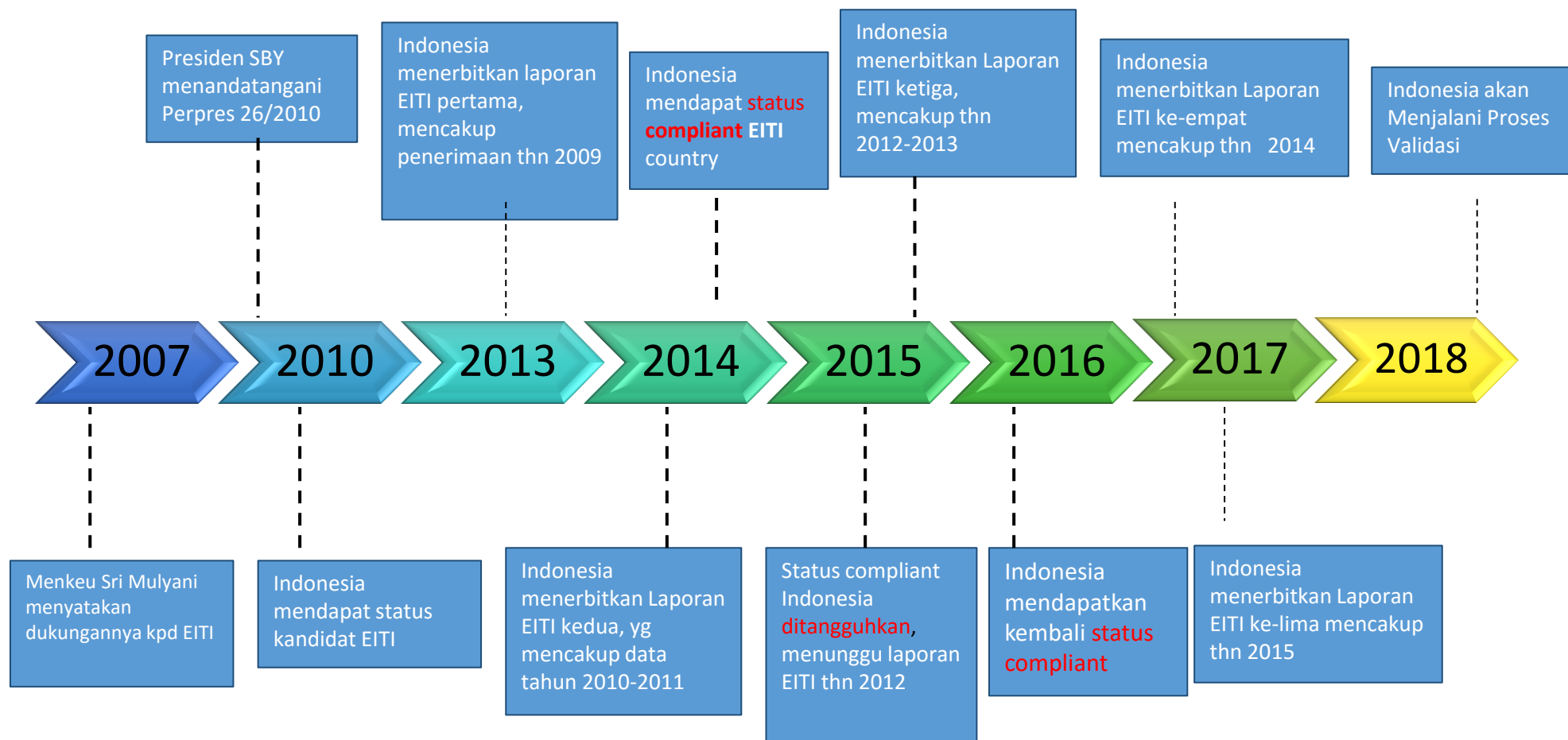
Perbaikan Tata Kelola Industri Ekstraktif

Kegiatan EITI

Penyusunan dan Penerbitan Laporan EITI

Analisis Data, Diskusi Publik dan Sosialisasi

Perbaikan Tata Kelola



- Penyusunan Laporan EITI
- Diskusi Publik dan Sosialisasi
- Pengembangan Portal Data
- Analisis dan Rekomendasi
- Rekomendasi perbaikan transparansi tata kelola
- Rencana Pengembangan EITI Daerah
- Rencana Pemberian Penghargaan Transparansi

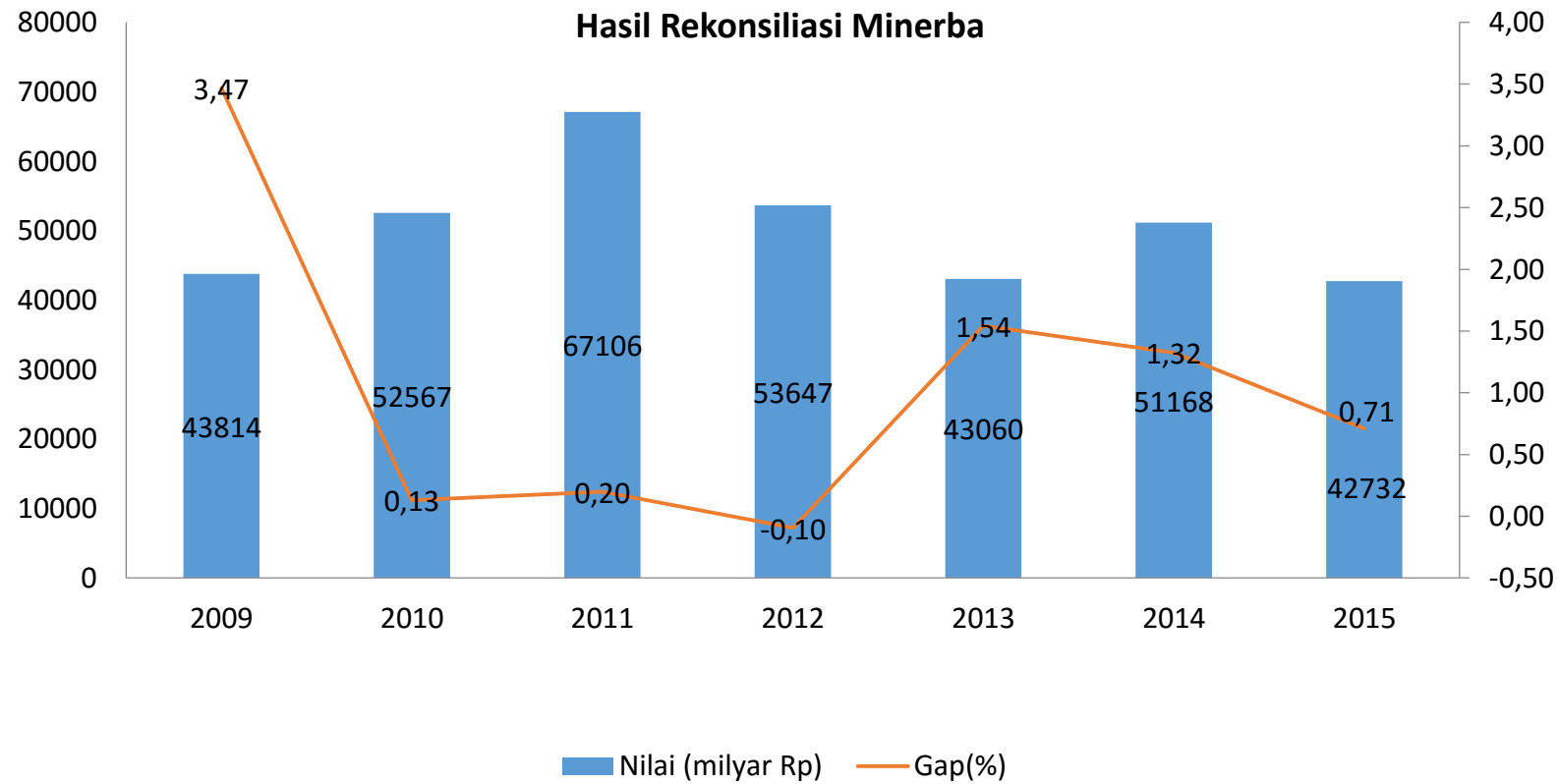
Partisipasi Perusahaan

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<u>Minerba:</u>							
Jlh Prshn Wajib Lapor	72	193	193	108	108	119	123
Jlh Prshn Yg Lapor	72	53	83	76	99	75	85
<u>Migas:</u>							
Jlh Prshn Wajib Lapor	57	71	71	67	72	71	69
Jlh Prshn Yg Lapor	57	71	71	69	72	71	64

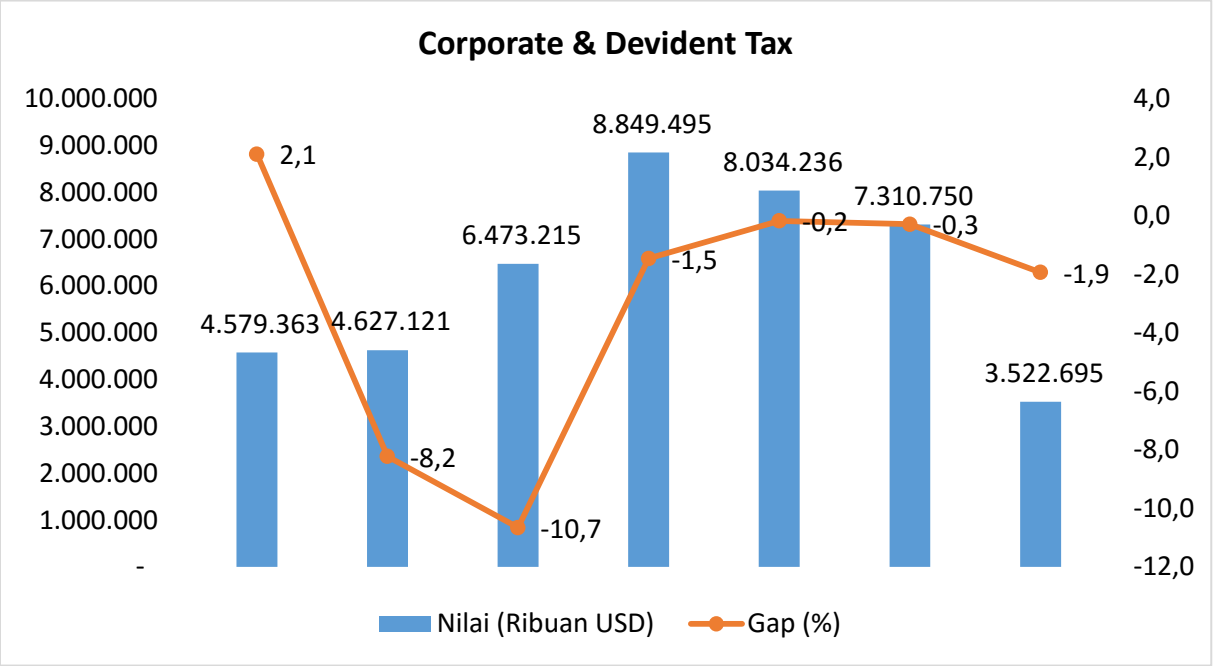
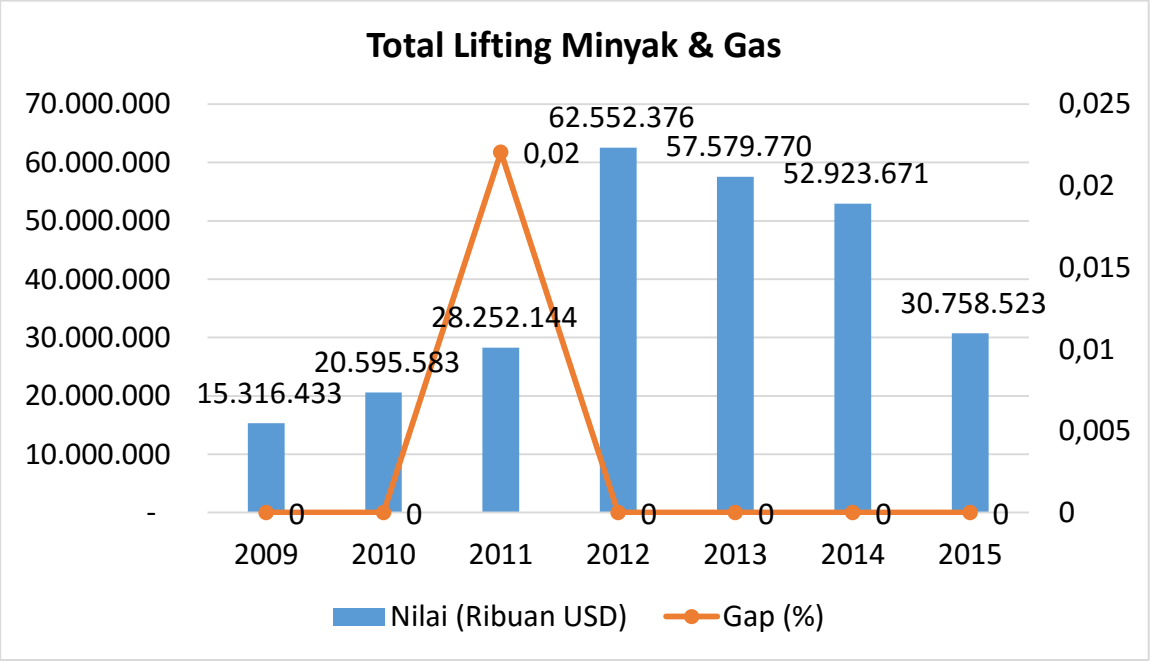
- Pembukaan data peserta lelang migas (list of bidders)
- Pembukaan kontrak minerba
- Pembukaan informasi kadaster
- Penyusunan Roadmap BO
- Analisis data

Hasil Rekonsiliasi

Gap Rekonsiliasi Minerba



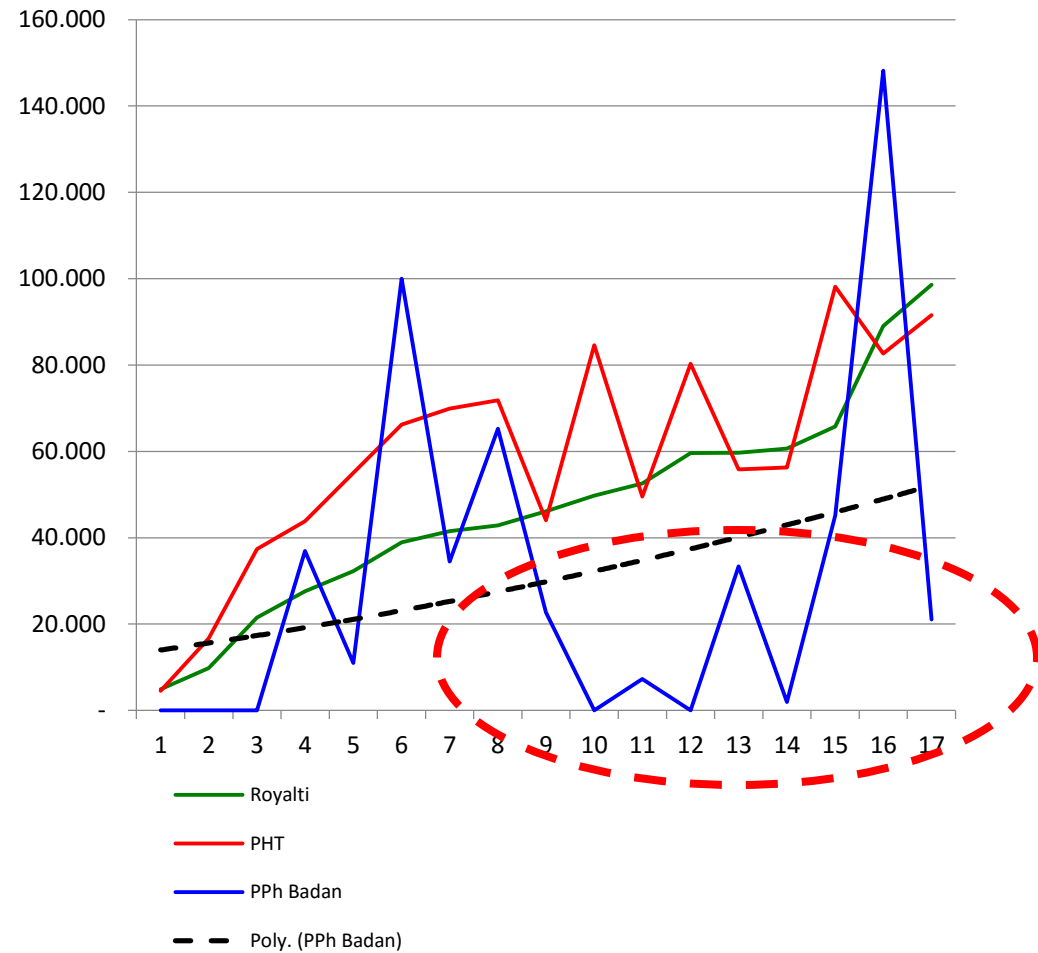
Gap Rekonsiliasi Migas



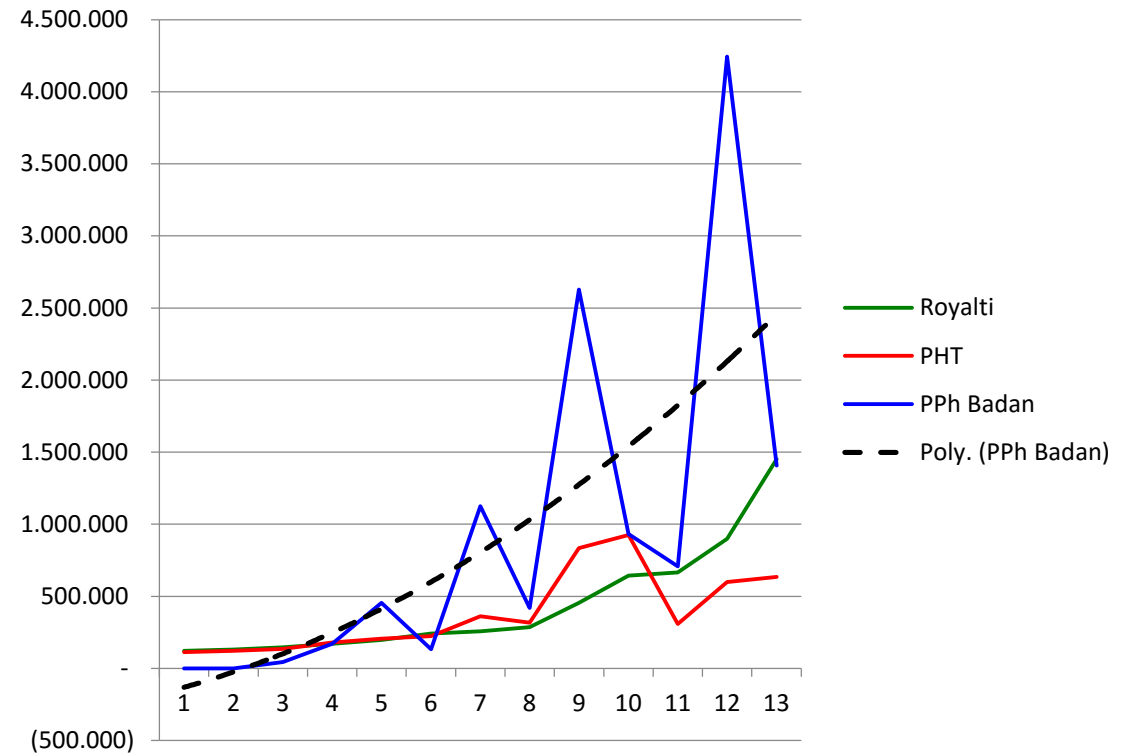
Analisis Pembayaran Pajak dan PNBP

Profil Perusahaan PKP2B Tahun 2010

Royalti < 100 Milyar

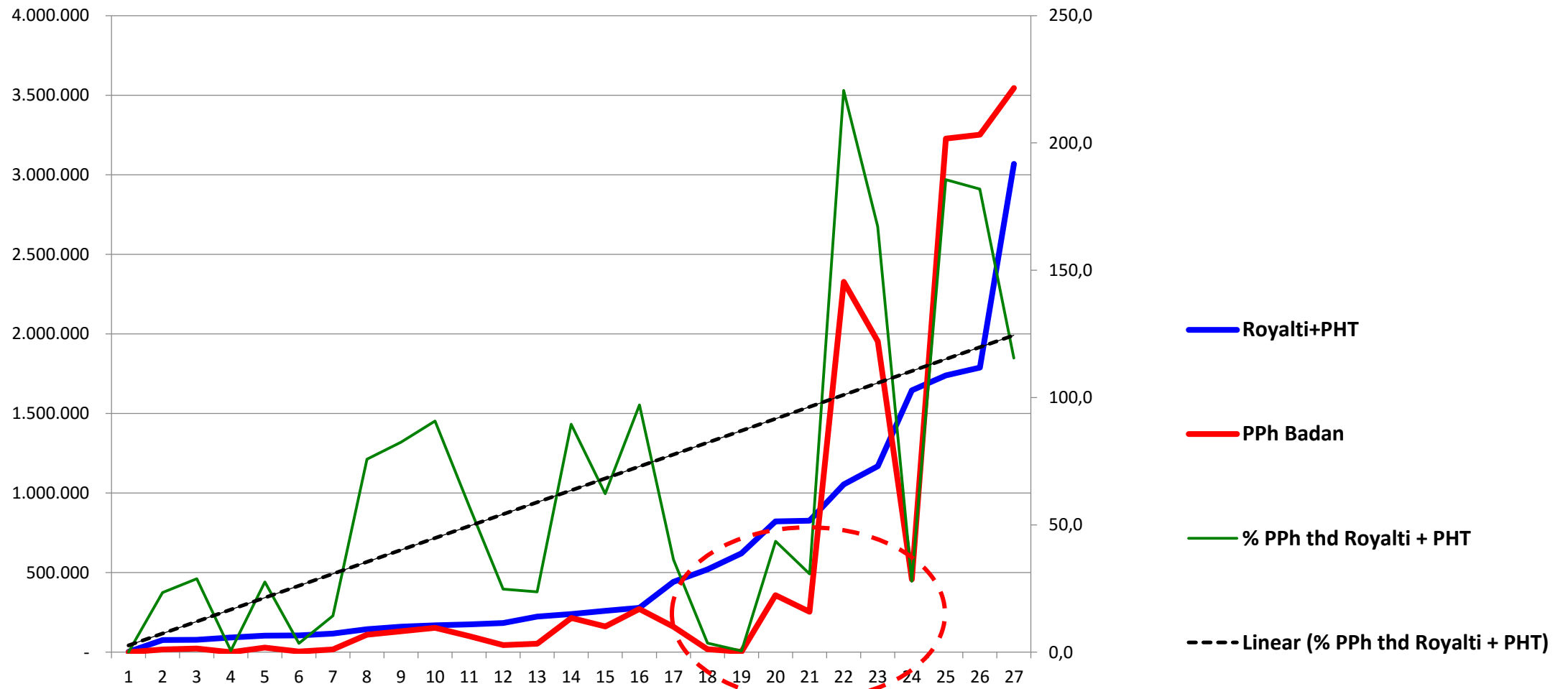


Royalti >+ 100 Milyar



Profil Perusahaan PKP2B

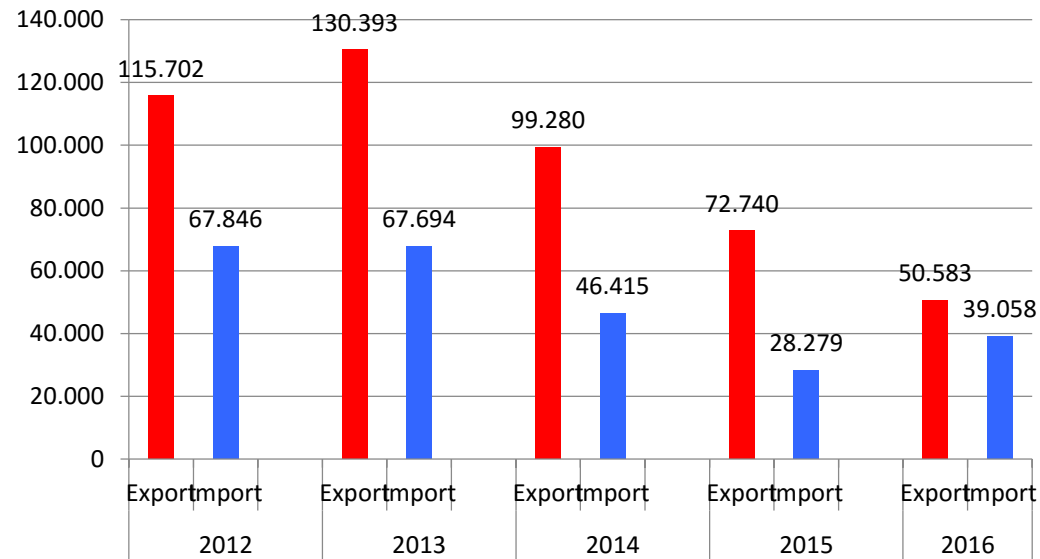
Tahun 2011



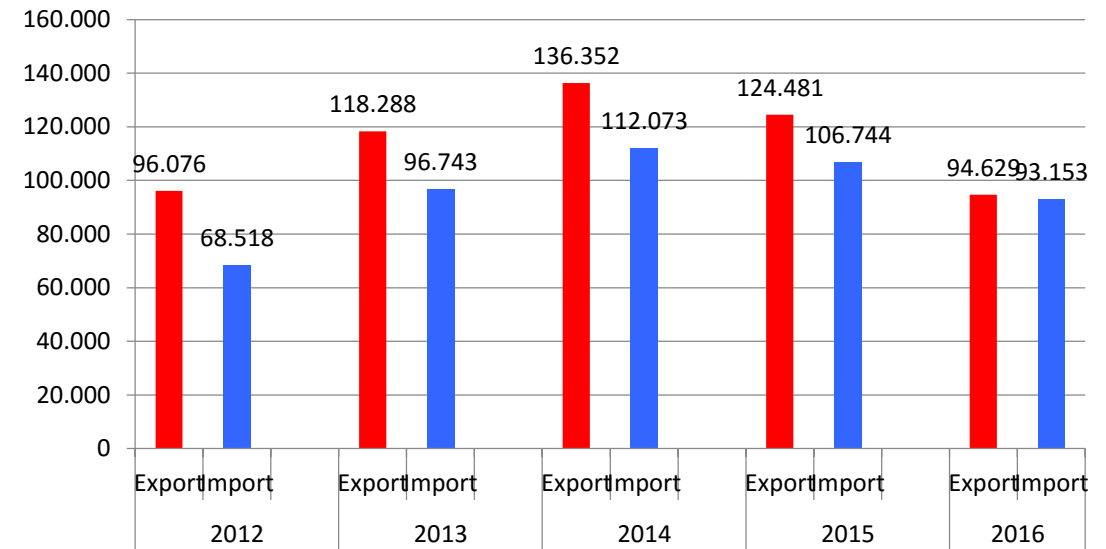
Rekonsiliasi Volume

Data Ekspor Batubara Indonesia ke China dan India

Data Ekspor Batubara Indonesia - China



Data Ekspor Batubara Indonesia - India



Sumber:

- Ekspor: BPS
- Import: UN Comtrade

Rekomendasi Laporan EITI 2015

Laporan Kontekstual:

- **Perlu adanya kesepakatan mengenai prosedur teknis yang memadai dan jelas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dapat mengakses data untuk dapat memproyeksikan jumlah dana bagi hasil migas**
- **Sekretariat EITI agar mengirimkan surat kepada PPID ESDM untuk membuka kontrak PKP2B dan KK di sektor hulu minerba**

Rekomendasi Laporan EITI 2017 (2)



- **Rekonsiliasi:**

- Tim Pelaksana diharapkan untuk melakukan kajian mengenai perlunya mengakomodasi pelaporan Pembayaran Lain ke BUMN dan/atau pemerintah. Apabila berdasarkan kajian tersebut pelaporan dianggap perlu maka *template* formulir Pembayaran Lain ke BUMN dan/atau Pemerintah ditambahkan dalam Pelaporan EITI tahun berikutnya.
- Rekonsiliasi volume total *lifting* minyak bumi dan volume total *lifting* gas bumi sebaiknya dilakukan antara KKKS dengan SKK Migas dengan menggunakan sumber data yang sama, yaitu FQR.
- Untuk pelaporan EITI yang akan datang, Sekretariat EITI direkomendasikan untuk memperoleh data pemilik *Participating Interest*, baik Operator KKKS maupun *partner* KKKS, dalam format perbandingan antara pemilik pada tahun ruang lingkup pelaporan EITI dan tahun dilakukannya pelaporan. Data tersebut agar diperoleh sebelum formulir isian entitas perusahaan didistribusikan.
- Perlunya menekankan pentingnya LO dan persyaratannya dalam sosialisasi kepada entitas perusahaan sektor migas. Selain itu persyaratan kelengkapan LO perlu diperjelas dalam formulir EITI, yaitu agar dilengkapi dengan materai, cap perusahaan dan dilampirkan dokumen pendukung mengenai identitas penandatangan LO, baik sebagai direksi perusahaan maupun kuasa perpajakan.
- Kegiatan sosialisasi EITI ke depan, Sekretariat EITI perlu menghubungi dan mengundang seluruh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi dimana wilayah pertambangan berada, untuk penyamaan persepsi tentang EITI dan untuk kepentingan koordinasi pada saat dilakukan kunjungan ke perusahaan pelapor.
- Rekonsiliasi PNBPN sebaiknya dilakukan antara perusahaan pelapor dengan Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai entitas pemerintah yang langsung menerima setoran PNBPN ke Kas Negara, sehingga akan memudahkan penelusuran jika terjadi perbedaan

Terima Kasih